

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah berpartisipasi aktif sebagai Warga Negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak pada tahap *collective action*.

5.1.2. Simpulan Khusus

Disamping kesimpulan umum di atas, diuraikan berkaitan dengan kesimpulan khusus, yang meliputi:

1. KPAID Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya perlindungan anak sebagai usaha pencegahan kekerasan pada anak melalui *Co-option, Cooperation, Consultation, Collaboration, Co-learning, Collective Learning*, di lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksankannya dan berfokus pada sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya.
2. KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan pendekatan partisipatif kepada Warga Negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya melalui pendekatan *vertical* kepada Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya dan *horizontal* kepada Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Masyarakat..
3. Hambatan partisipasi Warga Negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak diantaranya: (1). miskomunikasi karena pada praktiknya selalu bersinggungan dengan lembaga lain, (2). Kekurangan anggaran agar sosialisasi lebih massif, (3) rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kasih sayang bagi anak, (4). Kurangnya pendidikan pra nikah, sehingga menimbulkan ketidaksiapan secara mental menjadi orang tua. Sementara itu upaya yang dilakukan guna mengatasi

hambatan di atas, diantaranya; (1). Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga karena pada praktiknya selalu bersinggungan dengan lembaga lain, (2). Pengajuan usulan penambahan anggaran agar sosialisasi lebih massif, (3) Sosialisasi yang gencar di berbagai platform melalui media cetak dan digital (4). Bekerjasama dengan KUA untuk memberikan pendidikan pra nikah, sehingga calon orang tua siap secara mental menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

5.2. Implikasi

Peningkatan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, meningkatnya kasus tersebut merupakan keberhasilan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya agar apabila terjadi kekerasan pada anak, masyarakat segera melapor dan meningkatnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya kekerasan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Kedua, KPAID telah berkomitmen memberikan pelayanan yang responsif, melalui upaya preventif dan represif. Artinya dalam kaitan hal ini jumlah kasus dapat diabaikan, tetapi yang terpenting adalah pencegahan dilaksanakan semaksimal mungkin, dan apabila terjadi aksus kekerasan pada anak, maka KPAID Kabupaten Tasikmalaya cepat tanggap dan pendampingan kasus hingga tuntas.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang di ambil, maka peneliti mengajukan saran yang kiranya dapat menjadi masukan, adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

5.3.1 Bagi pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya

- a. KPAID Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi hingga ke lingkungan paling kecil yakni keluarga.
- b. KPAID Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu membuat kurikulum upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya

- c. KPAID Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga konsen dan program yang lebih sistematis untuk jangka pendek dan jangka panjang.

5.3.2 Bagi pihak Satgas PPA Kabupaten Tasikmalaya

- a. Satgas PPA Kabupaten Tasikmalaya harus lebih sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Satgas PPA Kabupaten Tasikmalaya lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena sebagai ujung tombak di masyarakat.
- c. Satgas PPA Kabupaten Tasikmalaya dapat bekerja sama dengan perusahaan yang ada di wilayahnya guna memberi penyadaran sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak.

5.3.3 Bagi PPA Polres Kabupaten Tasikmalaya

- a. PPA Polres Kabupaten Tasikmalaya diharapkan lebih aktif dan rutin dalam sosialisasi perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak.
- b. PPA Polres Kabupaten Tasikmalaya diharapkan lebih peka terhadap gejala dan membaca situasi wilayah yang dimungkinkan terjadinya kekerasan pada anak.
- c. PPA Polres Kabupaten Tasikmalaya diharapkan lebih cepat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi agar pelaku mendapat efek jera.

5.3.4 Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPA)

- a. Kemen PPA diharapkan mampu menambah daya dukung anggaran perlindungan anak melalui pemaksimalan upaya pencegahan.
- b. Kemen PPA diharapkan menjadi rujukan dengan membuat kurikulum dengan visi Indonesia Ramah Anak.

5.3.5 Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPAI RI)

- a. KPAI RI diharapkan dapat menjadi penggerak menghadirkan regulasi yang ramah anak secara optimal
- b. KPAI RI diharapkan mampu mengorganisir pembentukan KPAID di setiap wilayah kabupaten/kota se-Indonesia.

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

- d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari sudut pandang yang tidak tersentuh oleh peneliti.
- e. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan perbandingan kinerja KPAID satu kabupaten kota dengan kabupaten kota lainnya.

5.3.7 Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

- f. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mejalin kerjasama dengan KPAI Pusat guna membantu membuat rancangan pola pencegahan kekerasan pada anak sebagai bentuk tanggung jawab Warga Negara.
- g. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat berkontribusi melalui kegiatan di Hari Anak Nasional.
- h. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menyelenggarakan kompetisi atau lomba yang inovatif bekerjasama dengan KPAI.
- i. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang selanjutnya dan sumber literasi yang digunakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan